

Peranan Kredit Kelompok Petani Kecil Dalam Pembinaan Usaha Sampingan di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat

Rahmaniah*
Yusniar Lubis**
Azwana**

*Mahasiswa Magister Agribisnis Universitas Medan Area

**Dosen Magister Agribisnis Universitas Medan Area

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine of benefits, the motivation and the loan success factors to farmers at Deli Serdang and Langkat Regencies. The obligation and duty of government as a provider of facilities and services for the community. The services carried out by the department of technical implementation through their respective programs. This coaching program has output that with the formation of a strong institutional groups can be used by farmers to carry out the joint venture. As a result of the joint efforts of farmers have the additional job as a principal side business of work as small farmers. Thus the direct coaching program has helped local governments in providing jobs for small family farmers in the countryside . The studies had the conclusion that the small farmers who are the target P4K program is farmers who are still under the poverty line income that is equivalent to 320 kg of rice per capita per year. Agricultural extension workers have a responsibility to facilitate lending and repayment , so that no group is unrealized arrears due credit. Local governments are expected to provide special assistance fund for poverty alleviation programs and increasing aid channeled through the BRI was appointed to serve small farmers with specific rules and regulations and absolutely no partisanship on the farmers.

Keywords : agricultural extension, credit and poverty.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hingga saat ini perkembangan usaha agribisnis sebagai penggerak ekonomi pedesaan dinilai sangat lambat, diduga penyebabnya adalah karena terbatasnya akses petani pada kredit perbankan, sarana produksi, iptek dan pasar, juga karena lemahnya kelembagaan agribisnis di pedesaan yang belum dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi mitra bank maupun pasar (Soim, 2007).

Untuk membangun agribisnis daerah, peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini salah satu ketidakadilan yang dialami ekonomi daerah adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah khususnya pada on farm agribisnis. Selama 30 tahun terakhir, keluaran kredit pada on farm agribisnis di daerah kurang dari 20 persen dari total kredit perbankan, padahal sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia menggantungkan kehidupannya pada on farm agribisnis (Saragih, 2001).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, niaka tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan desentralisasi akan lebih besar dari sebelumnya, termasuk dalam mengupayakan sumber-sumber dana pembangunan untuk membiayai dan menjalankan fungsinya melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Usaha-usaha yang banyak melibatkan petani kecil di pedesaan merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan

ekonomi dan juga cikal bakal usaha di sektor agribisnis yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam penumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada petani kecil dengan segala aspek kegiatannya.

Pendapatan rata-rata rumah tangga pertanian masih berkisar Rp.300 ribu per kapita per tahun. Bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional yang telah mencapai sekitar Rp. 2 juta, maka pendapatan per kapita mereka tersebut rendah yakni sekitar 20% dari pendapatan perkapita nasional (Saragih, 2001).

Pengaruh globalisasi dapat membuat usaha petani skala besar dan skala kecil mempunyai peluang yang sama untuk berkembang. Pengaruh globalisasi yang bersifat positif seperti cepatnya informasi harga yang diterima memudahkanantisipasi perubahan pasar. Pengaruh yang sifatnya negatif misalnya pengusaha tidak mampu menanggulangi cepatnya informasi tersebut sehingga akan ketinggalan informasi terus-menerus (Sukartawi, 1996).

Saat ini petani kecil sebagai kekuatan ekonomi belum dapat diharapkan. Kendala dan masalah masih dialami antara lain kurangnya kemampuan dalam mengakses pasar, teknologi, sumber modal, berorganisasi dan bermitra dengan pihak lain. Petani tidak lagi hanya memproduksi sebanyak mungkin dan kemudian dijual di tingkat usaha tani tetapi juga dituntut untuk mengetahui selera dan kebutuhan konsumen. Petani dituntut untuk lebih memahami pasar, hukum penawaran dan permintaan, tanggap terhadap teknologi baru dengan cara-cara memanfaatkan sumber modal pinjaman. Untuk mengisi dan meningkatkan kemampuan petani tersebut adalah tugas pemerintah. Pemerintah dengan segala kekuatannya akan membantu

kelompok in melalui kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok tani kecil dalam gerakan ekonomi kerakyatan (Saragih dan Krisnamurthi, 1992).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Pertanian di tingkat pusat dan BLPLP di tingkat propinsi sedang melaksanakan program pemberdayaan kelompok petani kecil yang disebut dengan program P4K, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BRI. Pembinaannya dilakukan sampai sekarang. Program dilaksanakan di lokasi pilot proyek yaitu Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Galang dan Pagar Merbau, dan Kabupaten Langkat di Kecamatan Tanjung Pura dan Hinai.

Disamping bimbingan teknis oleh penyuluh lapangan bantuan kredit merupakan salah satu faktor bagi pertumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama. Oleh karena hal tersebut maka penyaluran kredit harus diteruskan sampai semua kelompok menerimanya. Pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam menyediakan dana bantuan yang dibutuhkan petani. Dengan penyaluran dana yang lancar kepada petani, maka kelompok petani kecil yang berada di bawah pelayanannya akan mempunyai kesempatan pekerjaan yang layak dan mempunyai pendapatan tetap.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh gambaran manfaat apa saja yang diberikan program tersebut kepada petani dan seberapa besarnya motivasi petani menggunakan bantuan kredit dalam menunjang usahanya.
2. Mengetahui faktor-faktor keberhasilan bantuan kredit yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan usaha petani beserta keluarganya.
3. Mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi

kendala yang dihadapi.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif yaitu melalui survey dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yang memiliki hubungan dengan data dan informasi yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Galang dan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, dan di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Penelitian dilaksanakan dalam waktu delapan minggu dimulai pada bulan Pebruari dan berakhir pada bulan Maret 2010.

Data dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara, diskusi dan pengamatan langsung di kelompok petani yang berada di lokasi Binaan Kabupaten dan Kecamatan serta kantor BLPLP sebagai pusat data. Data yang terkumpul dilengkapi dengan data dari responden yang diperoleh melalui daftar pertanyaan agar terarah dan terfokus pada informasi yang dimaksud.

Data yang dianalisis adalah data primer dan data skunder: Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan anggota kelompok petani kecil yang meliputi jumlah anggota kelompok, jenis-jenis usaha sampingan, pemberian kredit pinjaman serta manfaat dari pembinaan. Data skunder yang diperoleh dari Balai Latihan Pegawai Lingkup Pertanian (BLPLP), Dinas Pertanian Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka data yang diperoleh dilakukan langkah pembuatan tabulasi data.

Untuk mengetahui apakah ada tidaknya peranan kredit dalam memperlancar penumbuhan dan pengembangan kelompok

2. Hasil Dan Pembahasan

2.1 Perkembangan Kelompok

Perkembangan kelompok yang berhasil ditumbuhkan adalah sebanyak 98 kelompok untuk Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah anggota 3 89 orang, dan 71 kelompok untuk Kabupaten Langkat dengan jumlah anggota 386 orang. Tetapi karena adanya keterlambatan modal kredit rnyebabkan beberapa kelompok tidak aktif dan membubarkan diri.

Dengan adanya tambahan dana bantuan dari program P4K menyebabkan ketersediaan dana perguliran kredit menjadi lebih meningkat jumlahnya, maka jumlah perguliran akan bertambah sebanyak tambahan dana. Penumbuhan kelompok yang sudah siap akan mendapat pinjaman dengan lancer. System perguliran langsung memungkinkan penyediaan dana kredit menjadi lebih cepat perputarannya dan situasi ini akan mendorong Pembina lapangan dalam menumbuhkan dan menguatkan kelompok akan lebih cepat lagi. Jika kondisi ini dipertahankan ada kemungkinan kelompok makin mantap keberadaannya, dan mendorong kelompok yang kurang aktif meminta untuk dibina kembali.

Peningkatan jumlah dana yang berasal dari sumbangan petugas Pembina P4K dan anggaran pemerintah daerah. Dengan kesadaran keyakinan bahwa program ini dapat membantu rnen_yediakan lapangan pekerjaan bagi petani dan Enengurangi pengangguran di wilayahnya. Menurut informasi pada tahun mendatang pemerintah daerah akan menggunakan metode pembinaan ini karena sesuai dengan bagian dari sasaran strategi pembangunan yang telah dicanangkan. Selanjutnya peningkatan kelomppok dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. Perkembangan Kelompok Usaha Kabupaten Deli Serdang dan Langkat

Uraian Kegiatan	2006 (Kelompok)	2007 (Kelompok)
Kabupaten Deli Serdang		
- Penumbuhan Kelompok Petani Kecil	97	98
- Penerima kredit BRI	89	88
Kabupaten Langkat		
- Penumbuhan Kelompok Petani Kecil	34	71
- Penerima kredit BRI	34	71

Didalam perkembangan kelompok usaha antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat dapat dilihat adanya peningkatan penumbuhan kelompok bare, tetapi dalam penyaluran kredit untuk Kabupaten Deli Serdang terdapat penurunan dari 98 kelompok yang ada, hanya 88 kelompok yang bisa diberi bantuan kredit. Hal ini disebabkan karena keterbatasan modal bantuan kredit, sehingga ada 5.4 Sistem Penyaluran dan Pengembalian Kredit

Penyaluran kredit pada kelompok petani kecil telah dilakukan pada saat kelompok telah dianggap mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengelola kredit yang diberikan minimal setelah enam bulan sejak kelompok dibentuk. Ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pengawasan kelancaran, administrasi, keterbukaan penyaluran kredit menjadi upaya dalam langkah mempraktekkan manajemen partisipatif.

Pada tahun 2007 telah disalurkan bantuan kredit untuk Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 121.700.000,-, utuk Kecamatan

Tabel 8. Realisasi Angsuran Kelompok Tahun 2007

Uraian	Tahun 2007
Penyaluran	Rp. 121.700.000,-
Kabupaten Deli Serdang	Rp. 72.000.000,-
Kabupaten Langkat	Rp, 193.700.00,-
Jumlah	
Pengembalian	Rp. 121.700.000,-
Kabupaten. Deli Serdang	Rp. 72.000.000,-
Kabupaten Langkat	Rp. 193.700.000-
1 Jumlah tunggakan	0
Kabupaten Deli Serdang	0
Kabupaten Langkat	0
Jumlah	

2.2 Gambaran Manfaat yang Diberikan Program P4K

Secara umum hampir semua kelompok petani kecil dapat melaksanakan rencana usaha yang menurut analisa mereka dapat memberikan keuntungan. Dengan demikian jelas telah memberikan dampak positif berkaitan dengan penambahan pendapatan kelompok petani kecil.

Bahwa menurut hasil survey kelompok petani kecil yang diikuti dalam program ini adalah petani-petani yang umumnya mempunyai lahan-lahan sempit, bahkan sebagian terdiri dari petani-petani penggarap dan penyakap. Dengan sempitnya lahan mereka, maka dalam waktu singkat

2.3 Pemecahan Masalah

1. Kepedulian pemerintah daerah

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tugas sebagai penyedia fasilitas bagi masyarakat. Pelayanan dilaksanakan oleh dinas pelaksana teknis melalui program masing-masing. Kebijakan secara politis ada pada aparat pmda dalam mendanai dan mengakomodasi keperluan setiap dinas. Dengan meningkatkan keberpihakan kepada rakyat kecil akan menumbuhkan rasa keadilan yang sama pada semua warga, hares menikmati kehidupan yang layak. Atas keyakinan tersebut pasti akan terwujud kepedulian yang

dimaksud.

Program pembinaan ini mempunyai output bahwa dengan terbentuknya kelembagaan kelompok yang kuat dapat digunakan oleh petani untuk melaksanakan usaha bersama. Akibat dari adanya usaha bersama maka petani mempunyai pekerjaan tambahan sebagai usaha sampingna dari pekerjaan pokok sebagai petani kecil. Dengan demikian program pembinaan ini secara langsung telah membantu pemerintah daerah didalam menyediakan pekerjaan bagi keluarga petani kecil dipedesaan.

Dengan adanya pekerjaan yang tetap maka roda perekonomian akan berjalan dan tentu akan menciptakan keamanan dipedesaan. Dampak yang lain kernungkinan petani tetap berada didesanya dan tidak pindah kekota, maka tidak akan menambah angka urbanisasi.

2. Kemampuan penyuluh dalam menumbuhkan dan membimbing kelompok

Pemberdayaan petani kecil mempunyai beberapa prinsip kerja, satu diantaranya adalah pendekatan kelompok. Melalui kelompok, pembinaan dapat diterima oleh petani baik berupa pengetahuan dan bantuan kredit dan hal lainnya. Tetapi pembentukan kelompok oleh kelompok sendiri tidak semudah yang kita bayangkan, karena pengalaman petani tentang manajemen organisasi modern belum dikuasai. Hal inilah yang menjadi beban bagi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai target. Keberhasilan penumbuhan dan pembentukan kelompok petani kecil adalah tanggung jawab penyuluh.

3. Kesimpulan Dan Saran

3.1. Kesimpulan

1. Petani kecil yang merupakan sasaran program P4K adalah petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan yaitu berpenghasilan

- setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun .
2. Untuk Provinsi Sumatera Utara, lokasi kegiatan yaitu berada di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang dan Kecamatan Pagar Merbau. Kabupaten Langkat dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai., yang terbesar di dua puluh tujuh desa
 3. Program pengentasan kemiskinan dapat dijalankan apabila keluarga berpenghasilan rendah ikut secara aktif melaksanakan kegiatan pembinaan. Dengan demikian masalah-masalah petani dapat dikenali dan dibantu untuk dipecahkan bersama dengan penyuluh dan petugas terkait.
 4. Sampai sekarang ini sudah ditumbuhkan atau dibentuk 169 kelompok petani kecil dan 161 kelompok telah mendapatkan bantuan modal usaha yang digunakan dalam berbagai jenis kegiatan usaha bersama. Kelembagaan kelompok yang terbentuk dapat difungsikan dan dikembangkan tidak hanya sebagai kelompok usaha, juga dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan sosial lainnya.
 5. Bantuan kredit bagi petani kecil mempunyai peranan yang signifikan dalam memperlancar pembinaan kelompok, bantuan kredit yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh kelompok untuk meningkatkan kemampuan keuangan kelompok, sehingga kelompok dapat menumbuhkan dan menjalankan usaha-usaha sampingan untuk memperoleh tambahan pendapatan bagi keluarganya.
 6. Penyuluh pertanian mempunyai tanggung jawab untuk memperlancar penyaluran kredit dan pengembaliannya, sehingga tidak ada kelompok yang menunggak karena tidak terealisasi kreditnya.

- Penyuluh membimbing kelompok dengan menggunakan metode pendampingan dan pemecahan masalah. Kegiatan-kegiatan penumbuhan atau pembentukan kelompok merupakan penerapan metode pembelajaran penyuluh. Penyuluh dapat mengambil manfaat dari kegiatan penyuluhan tersebut untuk dijadikan lahan pengembangan prestasi dalam meningkatkan karirnya menjadi penyuluh melalui pengumpulan angka kredit untuk kenaikan pangkat.
7. Bantuan kredit yang diberikan kepada petani dirasakan kurang memadai besarnya sebagai modal kerja kelompok, tidak mencukupi untuk kegiatan usaha anggotanya yang berjumlah rata-rata 5 orang tersebut karena kemampuan menabung anggota masih relative kecil.

3.2. Saran

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dana bantuan khusus untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan bantuan yang sudah disalurkan melalui BRI yang ditunjuk untuk melayani petani kecil dengan aturan dan ketentuan yang khusus dan benar-benar ada keberpihakan pada petani.

Program pembinaan kelompok petani kecil yang secara nyata dapat meningkatkan kemampuan berusaha bagi petani dan dapat memberikan penghasilan, maka sebaiknya sistem ini digunakan oleh pemerintah daerah melalui dinas pertanian kabupaten untuk dijadikan salah satu program pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, K, 2002. Manajemen Produksi Lanjutan, Barran Kuliah dan Diskusi Manajemen Produksi, MM, USU.

- USU Press, Medan. Ginanjar, 1993. Strategi Pembangunan Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Gramedia, Jakarta.
- Gunardi, H. S., E. Suhendar, F. Rustiani, dan H. Yogaswara. 1994. Kredit Untuk Rakyat : Dari Mekanisme Arisan Hingga BPR. Akatiga, Bandung
- Hermanto, 1992. Perkembangan Perkreditan Pertanian Indonesia. Litbang Pertanian, Jakarta.
- Mardalis, 1995. Metode penelitian : Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara, Jakarta
- Rasyid, A., 2002. Materi Pemberdayaan KPK. Departemen Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), Jakarta
- Sangun, E., Indratmo, S. Astuti, 2005. Dinamika Dan Kerjasama Gabungan KPK. Departemen Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Jakarta
- Saragih, B., 2001. Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Edisi kedua. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.
- Saragih, B., 2001. Suara Dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis. Pustaka Wirausaha Muda, Jakarta
- Saragih dan Krisnamurthi, 1992. Pengembangan Agribisnis dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Kecil. Pustaka Wirausaha Muda, Salatiga.
- Sayogjo, 1980. Pembangunan Pertanian Pedesaan. IPB Press, Bogor. `
- Soim, A, 2007. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Untuk Desa-Desa Miskin, Sinar Tani. Jakarta.
- Sukartawi, 1996. Pengembangan Pertanian, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Suwandi, 2004. Penumbuhan dan Penguatan Kapasitas Gabungan

KPK. Departemen Pertanian,
badan Pengembangan SDM
Pertanian, Program Peningkatan
Pendapatan Petani Kecil (P4K),
Jakarta

Waluyo dan Djauhari, 1992. Kendala
Penyaluran Kredit Usaha Tani.
Litbang Pertanian, Jakarta.

Zachri, Z., 2002. Metodologi Penumbuhan
dan Pembinaan KPK (Pola P4K).
Departemen Pertanian, Jakarta.